

BAB 1

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem demokrasi yang kedaulatan negaranya berpusat dari, oleh dan untuk rakyat yang berdasar pada hukum. perwujudan ini termaktub dalam batang tubuh UUD NRI 1945 BAB 1 Demokrasi negara Indonesia dilandasi atas dasar falsafah bangsa yaitu Pancasila. Tersirat pada Sila ke 4 yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Khususnya Demokrasi Indonesia yaitu adanya musyawarah mufakat yang itu juga terkandung dalam Sila Ke 4 itu sendiri yang di mana musyawarah sebagai nilai luhur bagi kehidupan demokrasi Indonesia ini. Maka tak salah bahwa musyawarah menjadi ruh dari demokrasi Indonesia, Musyawarah merupakan suatu cara untuk menyatukan semua pihak dalam membicarakan rencana atau tindakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dengan mendasarkan pada kepentingan bersama. Proses ini melibatkan semua komponen masyarakat secara langsung dalam berpartisipasi dalam organisasi serta kehidupan politik.

Keterlibatan masyarakat dalam politik menunjukkan seberapa aktif mereka dalam mempengaruhi kebijakan dan keputusan, yang sangat penting untuk mencapai tujuan bangsa. Salah satu partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi ialah dengan keikutsertaan nya dalam pemilu untuk bagaimana bisa menentukan siapa yang layak untuk memimpin bangsa juga memiliki visi untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi cita-cita bangsa. Sebagai akibatnya, pendidikan politik berfungsi sebagai alat untuk menyemangati masyarakat agar lebih terlibat dalam menentukan arah kebijakan negara, serta untuk memperdalam pemahaman mengenai nilai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam situasi politik negara. Dengan pendidikan politik sebagai acuan selain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga meningkatkan kualitas dari pasrtisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. maka partai politik sebagai alat demokrasi dituntut untuk bagaimana bisa menghadirkan pendidikan politik yang baik agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berjalannya demokrasi bangsa ini. Dalam bahasa Arab, istilah untuk politik adalah *siyasa*, yang meliputi pengaturan, pengarahannya, pemerintahan, dan penyusunan kebijakan. Kata ini menegaskan bahwa maksud dari *siyasa* adalah

untuk mengelola dan merancang kebijakan politik demi mencapai tujuan tertentu. Pembahasan mengenai masalah ini dalam konteks hukum Islam dikenal sebagai *fiqh siyasa* (Solehuddin Harahap, 2022). Pada dasarnya, politik berkaitan dengan cara manusia berperilaku, seperti kegiatan, tindakan, dan sikap yang diambil untuk mempengaruhi atau mempertahankan struktur masyarakat dengan cara menggunakan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah inti dari politik, meskipun memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan di dalam kehidupan sosial masyarakat (Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, 2021).

Al-Mawardi, dalam karya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, menekankan bahwa tujuan utama politik dalam Islam adalah mencapai kemaslahatan (kebaikan bersama) bagi masyarakat. Menurut Al-Mawardi, pemimpin harus berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa politik dalam Islam bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi tentang pengabdian kepada umat. Teori ini relevan untuk pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam, karena menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam politik. Dan Abu Hamid Al-Ghazali, seorang filsuf dan pemikir Islam terkemuka, menekankan bahwa politik harus dilandasi oleh etika dan moral yang kuat. Dalam bukunya *Ihya Ulum al-Din*, Al-Ghazali mengajarkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang memiliki sifat adil, jujur, serta menjaga amanah. Menurut Al-Ghazali, kekuasaan tanpa etika dan akhlak mulia hanya akan membawa kerusakan. Teori ini cocok untuk mengajarkan kepada generasi muda bahwa berpolitik bukan sekadar meraih jabatan, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas.

Etika memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang politik. Di era politik yang selalu berubah sekarang ini, sering kali terjadi pelanggaran terhadap norma dan etika. Untuk itu, prinsip-prinsip etika dalam politik menjadi semakin krusial. Fiqh, yang merupakan ilmu tentang hukum Islam, memiliki kapasitas besar untuk memberikan arahan etika dalam konteks politik. Dalam tradisi Islam, politik tidak hanya berhubungan dengan penguasaan dan pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika. Fiqh sebagai bagian dari warisan Islam, memberikan berbagai pedoman etika yang relevan bagi politik masa kini (Tanjung & Tanjung, 2023).

Hubungan antara agama dan politik memang sangat unik, menarik, dan terkadang menggelikan. Konflik seringkali muncul sebelum akhirnya mencapai perdamaian. Sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa pemimpin agama, komunitas, dan lembaga dapat berperan sebagai penjaga moral masyarakat dan juga menjadi pengkritik tajam terhadap kekuasaan (Zaki, 2019).

Pandangan masyarakat dipengaruhi oleh etika politik dari kelompok elit politik. Etika itu penting dalam membentuk kemampuan individu untuk berpikir kritis dan rasional, serta membantu mereka mengembangkan pemikiran independen dan bertindak secara bertanggung jawab. Etika politik cenderung lebih dalam, abstrak, dan filosofis, sehingga menjadi seni kepemimpinan dan kualitas yang mengikuti hukum, budaya yang berlaku, serta nilai-nilai sosial, tradisi, dan umum sebagai sumber nilai yang dapat meningkatkan moral dan keberlangsungan suatu bangsa, Ritaudin, 2014 (dalam Sopi Ema dan Kawan-Kawan, 2024, hlm. 215). Etika politik dalam Islam memiliki sifat yang unik dibandingkan dengan etika politik pada umumnya karena berakar pada prinsip-prinsip Tuhan dan ajaran Nabi yang dianggap sakral. Penting untuk memahami penafsiran dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi dalam konteks ini. Selain itu, ketika situasi sosial terjadi, perlu ada kejelasan dalam pengakuan situasi tersebut dalam kerangka etika politik Islam. Ini berarti bahwa realitas balik dapat diberi justifikasi jika sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam naskah tersebut, meskipun hasil aktualisasi mungkin tidak selalu mengikuti nilai-nilai indoktrinasi. Oleh karena itu, epistemologi akhlak dalam Etika Politik Islam tidak dapat dipisahkan dari metode-metode pemahaman aliran, Terutama dalam hal memahami etika politik, di mana hampir semua cara untuk membuat keputusan dalam Syariah Islam tidak diterapkan secara seimbang (Dahlan, 2021).

Meskipun Al-Quran tidak secara jelas membahas evolusi sistem politik, kitab tersebut menekankan pentingnya dipercaya kekuatan politik kepala individu yang beriman dan berperilaku baik. Ini menunjukkan kualitas politik yang terkait dengan karakteristik tersebut. *Politics are also connected to geographical and historical contexts, shaping political events and relationships between different countries and regions.* Politik adalah bagian yang penting dari pemerintahan, membutuhkan pemimpin yang dipercayai oleh masyarakat dalam bertugas untuk kepentingan

mereka. Politik melibatkan sistem dengan elemen-elemen yang saling terhubung dan saling mendukung. Selain itu, politik mencakup berbagai kegiatan dalam suatu negara yang terkait dengan penetapan tujuan dan strategi untuk mencapainya (Kahfi Rezki, 2023).

Solehuddin Harahap (2022) berargumen bahwa Islam memiliki sistem politik yang komprehensif. Beliau meyakini bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti musyawarah dan keadilan yang sering diidentikkan dengan Barat telah ada dalam ajaran Islam sejak lama. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, satu-satunya agama yang diterima Allah. Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan (*akidah*), aturan hidup sehari-hari (*syariah*), hingga tata cara bermasyarakat (*muamalah*). Dalam Islam, aturan tentang pemerintahan dan negara (*siyasah*) juga diatur secara komprehensif. Hal ini meliputi aturan dasar negara, pembuatan undang-undang, peradilan, keuangan negara, pelaksanaan pemerintahan, hingga hubungan dengan negara lain. Dalam Peranannya Islam dalam Politik justru sangat melekat karna kehadiran islam sebagai *rahmatan lilalamin*, di mana dari mulai Zaman Nabi Adam A.s. sampai ke Nabi Muhammad SAW bahkan hingga saat ini islam tak lepas dari konsep politik, maka penerapan Peran Nilai-nilai Keislaman dalam Pendidikan politik sangat penting jadinya, apalagi di Negara yang Mayoritas Muslim/Islam seperti Indonesia karna akan mempengaruhi peran masyarakat dalam berpolitik juga pelaksanaan pemerintahan dalam politik kenegaraan itu sendiri.

Islam adalah agama yang sempurna (Q.S. Al-Maidah: 3) Hanya Islam yang diterima di sisi Allah Swt, yaitu dengan mengikuti rasul yang diutus-Nya (Q.S. Ali Imran: 19). Orang yang beriman (*Muslim*) diwajibkan untuk memasuki Islam secara menyeluruh (Q.S. Al-Baqarah:208) mengajarkan beberapa hal seperti *akidah*, *syariah*, *ibadah* (seperti sholat, puasa, zakat, haji, dll.), *akhlaq*, dan *muamalah* (seperti *muamalah syirkah* yang mengatur perekonomian, perdagangan, hutang-piutang, gadai, pengupahan dll.). Dalam konteks politik, *muamalah siyasah* adalah tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan menghindari kerusakan. Dalam konteks politik, ada beberapa jenis kebijakan yang dapat ditemui, antara lain kebijakan konstitusi, kebijakan legislatif,

kebijakan peradilan, kebijakan keuangan, kebijakan administrasi, kebijakan eksekutif, dan kebijakan luar negeri.

Namun Penerapan nilai keislaman dalam politik di Indonesia justru sudah ada jauh sebelum Indonesia berdiri, yaitu dari mulai Indonesia berbentuk Nusantara dengan di picu mulainya kedatangan para pedagang Islam ke nusantara. Dan berkembang hingga berdirinya Kerajaan-kerajaan islam di Nusantara yang memicu penyebaran Islam yang Masif di Indonesia. Dari Pejuang-pejuang Islam dari Era Penjajahan hingga Pra Kemerdekaan. Pada akhirnya terbentuknya Dasar Negara Indonesia yang secara eksplisit memunculkan identitas keislamannya yaitu yang termaktub dalam Dalam Pancasila poin Pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Yang secara Harfiah berarti dasarnya berdirinya Negara Indonesia itu atas Rahmat dari tuhan yang maha esa. Maka dalam proses politik berjalannya negara Indonesia tak lepas dari Nilai Agama terkhusus Nilai-Nilai Keislaman. itu dibuktikan juga banyaknya pejuang kemerdekaan Indonesia yang kebanyakan dari tokoh-tokoh Islam seperti Pangeran Diponegoro, hingga tokoh-tokoh islam Pasca Kemerdekaan seperti K.H. Agus Salim yang terkenal sebagai Diplomat ulung di Zamannya. Maka dengan negara yang mayoritas islam pelaksanaan politik kenegaraan akan berpengaruh didalamnya di mana kebijakan politik maupun partisipasi politik akan mengarah ke Nilai-nilai Islam. Maka Pendidikan politik yang mengarah pada penerapan politik dalam islam menjadi hal umum yang dilakukan agar tidak keluar dari kaidah yang seharusnya diterapkan.

Pendidikan politik merupakan proses mempelajari dan memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan politik adalah membantu individu menjadi warga negara yang kompeten dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik, hak dan kewajibannya dalam masyarakat, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik (Affandi Idrus 2021). Pendidikan politik sering juga disebut dengan *Political Farming* atau *Politische Bildung*. *Farming* artinya pendidikan politik memuat intensitas dalam melatih insan politik untuk menyadari status dan kedudukan politiknya dalam masyarakat, sedangkan *bildung* bermakna bahwa pendidikan politik adalah pendidikan mandiri yang mengandung

arti kegiatan pembentukan diri dengan kesadaran kita dalam memikul tanggung jawab sebagai insan Politik, Kartini Kartono (dalam Permana, 2022, hlm. 22).

Pendidikan Politik adalah tahapan proses pengenalan dan pembelajaran yang diperuntukan bagi masyarakat terkait wawasan pentingnya pengetahuan politik. Pendidikan politik juga dapat dijadikan sarana untuk membantu masyarakat di suatu negara menjadi berpengetahuan politik. Memahami politik dalam pengertian ini berarti mereka sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan menganggap kajian pendidikan politik perlu dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang kritis dalam mengkritik Pemimpin atau pemimpin politik yang gegabah dalam mengambil keputusan. Tingginya tingkat pendidikan politik suatu masyarakat sangat mempengaruhi pandangan politiknya, sekaligus meningkatkan harapan terhadap calon pemimpin yang dapat membawa perubahan bagi negaranya (Permana, 2022, hlm. 1-2). Pengertian Pendidikan Politik dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik ialah *“proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”*.

Selain itu Kartono (dalam Prasetyo, 2021, hlm. 22-23) Membagi pengertian pendidikan politik jadi dua, yaitu pendidikan politik yang difokuskan pada kader partai atau politikus, serta pendidikan politik yang mencakup semua aspek politik. Dalam pengertian yang lebih khusus, ini melibatkan pemberian pendidikan kepada generasi muda agar mereka siap menjadi kader politik yang dapat bersaing dalam dunia politik dan meraih kemenangan dalam pertarungan politik. Dalam pengertian yang lebih umum, pendidikan politik adalah usaha pendidikan yang disengaja dan terencana untuk membentuk individu dengan kepribadian politik dan kesadaran politik yang tinggi, serta dapat berperan aktif sebagai partisipan yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Penting bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan politik mengingat keberagaman kondisi masyarakat, di mana banyak yang masih kurang paham tentang politik. Pendidikan tersebut bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Ruslan, 2000 (dalam Wibowo dan Darmawan, 2021, hlm. 5), pendidikan politik adalah bagian dari pendidikan sosial secara keseluruhan. Melakukan kegiatan ini membawa berbagai pengalaman, pengetahuan, nilai, orientasi, dan kesiapan untuk berpartisipasi sebagai anggota dalam suatu komunitas sosial atau masyarakat, dengan tingkat aktivitas yang bervariasi. Maka Pendidikan politik yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman berakar dari prinsip-prinsip syariah Islam yang menonjolkan keadilan, amanah, dan kepedulian terhadap orang lain. *These values are not only important in the context of political leadership but also in establishing clean governance that is oriented towards the welfare of the society.* Dengan menggabungkan ajaran Islam dalam proses pembentukan calon pemimpin, diharapkan akan tercipta generasi pemimpin yang dapat menjalankan tugas dengan bertanggung jawab dan beretika.

Melalui kegiatan pendidikan politik yang diadakan oleh partai politik itu, kader-kader memperoleh pemahaman baru tentang pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan politik. Agar dalam praktiknya, kader paham dan mengerti tindakan yang perlu dilakukan untuk berkontribusi dan terlibat dalam kegiatan politik. Kontribusi aktif dari para kader dalam kegiatan politik diartikan sebagai persiapan utama untuk melaksanakan aktivitas politik. Hal ini memungkinkan para kader untuk menyebarkan kembali nilai-nilai yang mereka pelajari selama proses pendidikan politik dalam partai kepada masyarakat umum. Menurut Alfian, 1986 (dalam Wibowo dan Darmawan, 2021, hlm. 5), temuan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan politik dapat diartikan secara ketat sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat. Tujuannya adalah agar mereka dapat menghayati dan memahami nilai-nilai yang terdapat dalam sistem politik ideal yang ingin dibangun. Sementara kader melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum untuk mengubah nilai-nilai yang dianggapnya ideal. Pendidikan politik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sukai atau tidak, sadari atau tidak, semua orang mengalami hal itu, baik mereka yang berkuasa maupun orang biasa.

Pendidikan Politik yang berbasis pada penerapan nilai-nilai keislaman mejadi penting akhirnya untuk diterapkan dengan seiring berjalannya proses politik di mana muncul nya partai politik, tak luput juga partai politik yang hadir membawa

nilai-nilai islam di dalamnya untuk menarik minat masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam politik. Partai-partai politik yang pertama membawa nilai-nilai Islam dalam Ideologinya diantaranya Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah, serta Partai Persatuan Thariqat Indonesia. Dan Partai politik itu berkembang menjadi partai politik Islam yang lain seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan yang hari ini menjadi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa yang melekat dengan Ke NU an nya, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional yang melekat dengan Muhammadiyahnya pada saat awal pendiriannya, hingga yang terakhir munculnya Partai Ummat. Memang banyak sekali hingga akhirnya partai yang membawa perspektif nilai-nilai islam namun yang menjadi pertanyaannya nilai-nilai islam seperti apa yang di bawanya untuk bisa di terapkan di masyarakat dalam konsep pendidikan politiknya. Karna pasti setiap partai Islam memiliki tujuan dan maksud yang sama dalam menerapkan pendidikan politik yang di mana agar masyarakat islam di Indonesia menjalankan partisipasi aktif politik dengan tidak meninggalkan apa yang menjadi konsep nilai islam dan dapat menerapkannya dalam kehidupan bernegara.

Tujuan dari pendidikan politik bukan hanya untuk membuat orang memahami konsep dan teori politik, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga negara terhadap peristiwa politik dalam masyarakat dan negara. Ini dilakukan dengan mendorong partisipasi mereka dalam proses politik tersebut. Berkaitan dengan beberapa pihak yang harus memberikan Pendidikan politik kepada warga negara, ada beberapa peraturan yang mengaturnya. Salah satu tanggung jawabnya adalah pada partai politik. Tujuan pendidikan politik di suatu negara adalah untuk menyiapkan generasi penerus yang mengerti dan meneruskan nilai-nilai sistem politik, keyakinan, dan budaya. Hal ini juga bertujuan untuk menyamakan cara berpikir tentang nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan negara, memperkuat sikap dalam menerapkan nilai-nilai tersebut, dan mengembangkan keinginan untuk melestarikannya (Prasetyo. 2021).

Partai politik mencerminkan kebebasan berserikat, berserikat, dan berekspresi, Ritonga, 2015 (dalam Wijaya Kusuma dan Kawan-Kawan, 2020, hlm. 165). Keberadaannya dilindungi oleh konstitusi dalam sistem demokrasi konstitusional.

Partai politik juga membentuk aturan hukum yang demokratis. Dalam politik pencegahan di lembaga pemerintahan, partai politik memiliki peran yang penting dan posisi strategis, Natalia, 2015, Ristyawati, 2019 (dalam Wijaya Kusuma dan Kawan-Kawan, 2020, hlm. 165). Partai politik hadir sebagai elemen demokrasi juga melaksanakan pendidikan politik yang di mana dalam proses kaderisasinya partai politik pasti menerapkan pendidikan politiknya masing-masing sesuai dengan Etik, nilai, tujuan dan orientasi dari partai politiknya itu sendiri. Kehadiran partai politik dalam sistem kenegaraan muncul karena lahir dari representatif setiap kelompok atau sebagai masyarakat yang secara sederhana memiliki ideologis yang sama dan juga mencapai kepentingan dengan bersama sama. Maka dari proses kaderisasi dalam pendidikan politik yang di lakukan oleh setiap partai politik pasti mencerminkan dari identitas partai politik itu sendiri.

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Definisi Partai Politik ialah “Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”. Menurut Miriam Budiharjo (dalam Prasetyo, 2021, hlm. 5) Partai Politik adalah sebuah kelompok terorganisir di mana anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang serupa. Menurutnya, dalam negara demokratis, partai politik memiliki peran sebagai alat komunikasi politik, alat sosialisasi politik, alat rekrutmen politik, dan sebagai alat pengatur konflik. Partai politik menurut Undang-Undang partai politik merupakan organisasi nasional yang dibentuk oleh warga Negara Indonesia secara sukarela dengan tujuan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik juga bertujuan untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gusmansyah (2019), Berpendapat Partai politik adalah suatu kelompok yang didirikan untuk memperjuangkan pandangan, keyakinan, dan tujuan tertentu dari sejumlah orang tentang kehidupan bermasyarakat melalui perjuangan politik, yaitu

mengelola kekuasaan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Partai politik adalah bagian penting dari sistem demokrasi di semua negara di dunia. Partai politik dianggap sebagai simbol atau representasi negara modern. Itulah sebabnya, hampir semua negara, baik demokrasi maupun komunis, maju maupun berkembang, memiliki partai politik. Namun, bentuk dan peran partai politik bervariasi di setiap negara tergantung pada sistem politik yang berlaku di negara tersebut.

Maka berbicara terkait identitas partai politik, Dilihat dari aspek sosiologis masyarakat Indonesia merupakan mayoritas kepercayaan Muslim atau beragama Islam. Dari beberapa partai politik yang ada di Indonesia sekarang juga membawa ideologis nilai keislaman dalam membangun citra partai politiknya, yang di mana setiap unsur kegiatannya pasti mencerminkan nilai keislaman. Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera yang dari sekian banyaknya partai politik yang ada di Indonesia yang mencerminkan nilai nilai keislaman dalam berpolitik atau memperkenalkan partai politiknya, terkhusus dalam kaderisasi pendidikan politiknya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai politik Islam yang dimulai dari gerakan reformasi pada tahun 1998. PKS didirikan dengan nama Partai Keadilan (PK). Namun, pada tahun 2002, nama partai ini diubah menjadi PKS setelah tidak berhasil mencapai ambang batas parlemen pada Pemilu 1999. PKS didirikan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi Indonesia. Partai ini memiliki jaringan kader yang kuat, khususnya di kalangan masyarakat Muslim di kota-kota. Sebagai partai yang berbasis gerakan dakwah, PKS memprioritaskan isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum, serta nilai-nilai keislaman yang dijalankan melalui program-program di parlemen dan pemerintah. Baru-baru ini, PKS telah mengalami perubahan besar, baik dalam strategi maupun pendekatan politiknya. Partai ini menambah basis pemilihnya dengan menarik dukungan dari masyarakat perkotaan dan kaum muda, serta memperluas citranya sebagai partai Islam yang ramah terhadap semua orang. PKS bekerja sama dengan partai-partai non-Islam dalam beberapa pemilihan umum terakhir. Langkah ini menunjukkan bahwa partai memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan politik yang rumit di Indonesia dan tetap relevan di mata pemilih yang lebih banyak. Meskipun mendapat kritik, seperti soal posisinya dalam berbagai

koalisi, PKS tetap menjadi kekuatan utama dalam politik Islam di Indonesia. Beberapa studi menunjukkan bahwa PKS memiliki dukungan yang kokoh dan tetap, khususnya dari kalangan pemuda dan umat Muslim di perkotaan. Selain itu, partai ini aktif mengangkat isu-isu tentang moralitas dan kebijakan publik di tengah politik Indonesia yang berubah-ubah yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Mietzner, M. 2019).

Seiring proses berjalannya waktu kondisi politik dalam penerapan Nilai-nilai Islam melalui kaderisasi pendidikan Politik oleh partai, banyak sekali tantangan yang dihadapi hari ini hingga kedepan hari diantaranya: (1) Keseimbangan antara Nilai-nilai Keislaman dan Praktik Politik Modern, Integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan politik moden sering menghadapi cabaran dalam mencapai keseimbangan antara prinsip moral Islam dan keperluan praktikal serta dinamika politik semasa. Ahli politik patut faham dan gunakan prinsip-prinsip ini dalam situasi yang kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik dan praktikal; (2) Pemahaman dan Interpretasi Nilai-nilai Keislaman, *Diverse ideology and understanding in Islam can result in varying perspectives on how those values should be implemented in politics*. Menyelaraskan pemahaman ini merupakan hal yang cukup sulit dalam memastikan bahwa pemberian pelatihan politik tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersifat menyeluruh; (3) Penerimaan di Kalangan Partai Politik dan Publik, Melaksanakan prinsip-prinsip agama dalam proses peningkatan kualitas politik bisa menghadapi penolakan dari kelompok-kelompok yang memiliki pendapat yang berbeda atau tidak sepenuhnya mendukung penyatuan nilai agama dalam bidang politik. Di samping itu, terdapat tantangan dalam meyakinkan masyarakat luas bahwa penggabungan ini tidak akan menghalang tujuan politik yang lebih umum.

Melihat Kondisi Politik kota Bandung dalam penerapan nilai-nilai keislaman selama 5 Tahun terakhir menghadapi banyak persoalan. Diantaranya: Pluralisme, dimana masyarakat kota Bandung merupakan masyarakat Plural dimana beragam sekali pemahaman nilai agam dalam penerapan nilai-nilai Politik Apalagi Nilai-nilai politik islam, maka dari itu dapat menimbulkan banyak perbedaan pandangan dalam penerapan nilai-nilai islam dalam politik; Radikalisme, adanya kelompok agamis yang mengatasnamakan islam dalam penerapan pemahaman terkait

keagamaan yang ekstrem sehingga rentan menimbulkan konflik dengan kelompok moderat di masyarakat kota Bandung; Politik Identitas dan Konflik Horizontal, Mengganakan agama dalam kepentingan politik yang berdampak terhadap polarisasi masyarakat yang menimbulkan perbedaan pandangan dalam penerapan nilai-nilai islam dalam politik, juga pembawaan isu agama secara berlebih dan memicu konflik antar masyarakat; masih minimnya pemberian nilai-nilai keislaman dalam politik oleh tokoh keagamaan dan lembaga keagamaan yang seringkali memiliki kapasitas yang terbatas dalam memberikan pengaruh dalam kebijakan publik; Kualitas Elit Politik, Pemangku Kebijakan atau elit Politik yang tidak ideal dan juga masih maraknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di dalam pemerintahan atau kebijakan politik oleh para elit yang beragama islam terkhususnya menurunkan kepercayaan masyarakat dalam penerapan nilai-nilai islam dalam berpolitik (Amanullah, 2019).

Berdasarkan kondisi yang dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian Terkait Pendidikan Politik yang berjudul “**Penanaman Nilai-Nilai Keislaman Melalui Kaderisasi Pendidikan Politik di Masyarakat Kota Bandung Studi Kasus di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung**”. Harapan dari adanya penelitian ini Penulis dapat mengetahui Nilai-nilai Islam yang seperti apa yang selama ini diterapkan oleh PKS dalam Kaderisasi Pendidikan Politiknya.

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka peneliti menyusun Rumusan Masalah sebagai berikut:

- 1) Nilai-Nilai Islam seperti apa yang dikembangkan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dalam Penerapan Pendidikan Politik di Kota Bandung?
- 2) Bagaimana Penerapan Nilai-Nilai Keislaman melalui Kaderisasi Pendidikan Politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung?
- 3) Kendala apa yang dihadapi oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dalam Penerapan Nilai-Nilai Keislaman melalui Kaderisasi Pendidikan Politik dan Strategi apa yang diterapkan untuk bisa menangani permasalahan tersebut?

2.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Nilai-Nilai Islam yang dikembangkan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dalam Penerapan Pendidikan Politik di Kota Bandung.
- 2) Penerapan Nilai-nilai Keislaman melalui Pendidikan Politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung.
- 3) Kendala yang dihadapi oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dalam Penerapan Nilai-Nilai Keislaman melalui Pendidikan Politik dan Strategi yang diterapkan untuk bisa menangani permasalahan tersebut.

2.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diterima adanya penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini, akan menjadi bahan informasi ilmiah bagi para aktivis partai yang membawa ideologi keislaman terkait menjalankan dan menerapkan nilai-nilai islam dalam kaderisasi pendidikan politiknya terkhusus di Partai Keadilan Sejahtera. Lalu menjadi bahan referensi bagi masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi aktif di pendidikan politik terkhusus dalam mengedepankan nilai-nilai islam dalam berpolitik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman terkait kaderisasi pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik yang membawa nilai-nilai keislaman dan memberikan kontribusi nyata bagi politik di indonesia dengan tetap menerapkan nilai ideologis yang dibawanya.

2) Bagi Partai Politik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi bagi dunia partai politik terkhusus partai politik yang membawa nilai-nilai keislaman dalam menjalankan kaderisasi pendidikan politik di partainya sendiri sebagai *value* khusus bagi partai politik yang membawa

nilai islam di tengah masyarakat indonesia yang mayoritas beragama Islam.

- 3) Bagi Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pasundan

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pasundan dalam mengetahui Nilai-nilai Islam dalam Politik yang penerapannya melalui kaderisasi pendidikan politik.

- 4) Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi penambah wawasan terkait Nilai-Nilai Islam dalam Politik, yang di mana salah-satu penerapannya di dalam kaderisasi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai yang berideologi Islam.

2.5 Definisi Oprasional

Untuk Menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan dalam menggunakan Istilah-Istilah dalam skripsi ini, Maka penulis perlumenjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, Antara lain:

1.5.1 Nilai-Nilai Islam

Nilai-nilai yang dimaksud disini ialah yang terkait politik atau politik menurut nilai keislaman seperti apa. Al-Mawardi, dalam karya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, menekankan bahwa tujuan utama politik dalam Islam adalah mencapai kemaslahatan (kebaikan bersama) bagi masyarakat. Maka islam memiliki tujuan tersendiri terkait penerapan politiknya yang sesuai dengan ajaran etika moralnya islam yang tak jauh dari sifat adil, jujur dan amanah.

1.5.2 Pendidikan Politik

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dijelaskan bahwa "*Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik adalah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara*". Tujuannya adalah agar individu menjadi warga negara yang kompeten dan

memahami sistem politik serta cara berpartisipasi dalam proses politik, Affandi, Idrus (2021).

1.5.3 Partai Politik

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dijelaskan bahwa “*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Menurut Miriam Budiarjo Partai politik adalah kelompok orang yang terstruktur dan terorganisir, terdiri dari individu dengan nilai, tujuan, dan pandangan yang sama. Mereka bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional untuk mewujudkan berbagai kepentingan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai politik berbasis Islam di Indonesia yang didirikan pada tahun 1998 sebagai kelanjutan dari Partai Keadilan (PK). PKS terbentuk dengan tujuan membawa nilai-nilai Islam ke dalam sistem demokrasi Indonesia, serta memperjuangkan isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Partai ini memiliki basis kader yang kuat dan terorganisir, dengan pengaruh signifikan di kalangan Muslim perkotaan dan pemuda. PKS juga dikenal sebagai partai dengan struktur internal yang disiplin dan mampu mempertahankan loyalitas pendukungnya, terutama di wilayah perkotaan.

PKS terus berupaya memperluas daya tariknya dengan mengedepankan isu-isu nasional yang lebih inklusif, serta berkoalisi dengan partai-partai non-Islam pada beberapa pemilu terakhir. Meski menghadapi berbagai tantangan politik, termasuk perubahan konstelasi dan pergeseran preferensi pemilih, PKS tetap menjadi salah satu partai Islam yang berpengaruh dalam politik Indonesia. PKS juga konsisten menyuarakan nilai-nilai moralitas dan kebijakan publik di parlemen, memperlihatkan fleksibilitasnya dalam menjaga relevansi di tengah masyarakat pluralis.

2.6 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diartikan sebagai pengantar penelitian yang sedang dikerjakan, menjelaskan apa yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan, kemudian permasalahan yang mendasari penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika dalam penyusunan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teoritis dari setiap variable yang dijadikan sebagai bahan dalam melaksanakan riset penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga menjabarkan terkait dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang dipilih oleh peneliti, dan kerangka pemikiran yang disajikan untuk memaparkan konsep terhadap penelitian, serta asumsi penelitian dari judul yang diambil

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan hal mengenai pendekatan penelitian, metode penelitian, subjek dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta Teknik analisis data yang akan dipakai untuk dijadikan sebagai teknik pengkajian yang akan dilakukan oleh peneliti saat berada di lapangan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membuat hasil terkait analisis penelitian dan menjawab setiap bagian dari rumusan masalah. Pada bab ini juga peneliti menjelaskan pembahasan serta mengaitkan hasil penelitian yang didapat dengan dasar teori serta metode yang digunakan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan hasil penelitiannya dan menjadikan hasil penelitian tersebut kedalam kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan peneliti dapat menjabarkan masalah pada penelitian serta hasil dari penyelesaian masalah yang didapatkan. Sedangkan dalam bagian saran, peneliti mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Di mana saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.